

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena perkembangan sektor publik dapat diamati dengan semakin menguatnya tuntutan atas pelaksanaan akuntabilitas publik. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat (Renyowijoyo, 2013). Keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar pertanggungjawabannya kepada publik.

Setiap instansi pemerintah yang telah diberikan mandat harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang telah diembannya. Hal ini dilakukan dengan cara mengungkapkan segala sesuatu yang dilakukan, dilihat dan dirasakan baik yang menghasilkan kegagalan maupun keberhasilan. Laporan pertanggungjawaban tidak hanya berkenaan dengan laporan kepatuhan dan kewajaran pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku, tetapi juga berkaitan dengan kinerja dari pelaksanaan suatu manajemen strategis yang dapat menjawab pokok permasalahan mengenai apa yang harus dipertanggungjawabkan. Penerapan konsep akuntabilitas telah dijalankan pada seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah dalam menerapkan konsep akuntabilitas pada setiap lini pemerintahan akan menyebabkan terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan Negara.

Munculnya tiga paket Undang-Undang memberikan dampak perubahan dalam pengelolaan keuangan yang mengakibatkan terjadinya reformasi dalam manajemen keuangan. Tiga paket Undang-Undang tersebut terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Tiga paket Undang-Undang tersebut mendorong pemerintah mengelola keuangannya menjadi lebih baik dan membuat laporan pertanggungjawaban yang

disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut mewajibkan pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporannya.

Salah satu bentuk reformasi yaitu adanya pendekatan penganggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran pemerintah. Penerapan anggaran berbasis kinerja telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pentingnya akuntabilitas oleh instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola dan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah dialokasikan. Masyarakat sebagai pihak yang mendelegasikan pekerjaan kepada pemerintah daerah berhak untuk memperoleh informasi atas kinerja pemerintah. Dasar akuntabilitas kinerja termuat pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk melakukan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada laporan kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan sebuah keharusan yang perlu dilakukan dalam membagikan pertanggungjawaban yang menerangkan kinerja sekaligus aktivitas dari pegawai, pimpinan atau lembaga kepada divisi yang berhak atau berkewajiban untuk membawa informasi dan keterangan terkait sukses tidaknya pengamalan program kegiatan yang disusun (Abdullah, 2017).

Dalam mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang baik, pemerintah Kota Pasuruan dituntut untuk selalu melakukan perbaikan dalam kinerjanya. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja oleh pemerintah Kota Pasuruan diharapkan anggaran yang disusun dapat diwujudkan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Keberhasilan kinerja instansi pemerintah dapat dicerminkan dari peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara pengalokasian APBD yang baik. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap pengalokasian dan APBD maka harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi

terhadap laporan APBD. Dari data yang didapatkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pemerintah Kota Pasuruan tahun 2021 presentase realisasi anggaran mencapai 81,86 % dimana hal tersebut dikategorikan sebagai capaian yang cukup baik tetapi belum mencapai indikator baik ataupun sangat baik. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah masih belum merealisasikan anggarannya dengan baik. Presentase didapatkan melalui perbandingan alokasi anggaran pemerintah Kota Pasuruan sebesar Rp 1.048.788.636.231,00 dan realisasi belanja sebesar Rp 858.584.017.159,52.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang digunakan adalah: Apakah penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada pemerintah daerah Kota Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pada pemerintah daerah Kota Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan terkait pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pada pemerintah daerah Kota Pasuruan.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar rujukan untuk instansi pemerintah dalam memperbaiki capaian kerjanya

3. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian terkait penerapan anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja.